



Framing Media Nasional dan Internasional tentang Kesepakatan Diplomatik Indonesia China di Laut China Selatan

Joko Prawito¹; Sudarto²; Aprilianti Pratiwi³; Bonny Perkasa Halim⁴

^{1,2,3,4}Program Magister Media dan Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Indonesia, 12630

Email: joko.prawito@gmail.com^{1*}; sudarto@univpancasila.ac.id²;
apriyantipratiwi@univpancasila.ac.id³; bonnyphalim@yahoo.com⁴

Article Info

Dikirimkan:
23-05-2026

Diterima:
23-06-2026

Diterbitkan:
10-07-2026

DOI:



Vol 14 (No.1), 2026

Hal 18 - 37

ABSTRACT

Introduction: The diplomatic agreement between Indonesia and China following President Prabowo Subianto's visit to Beijing in November 2024 sparked public debate over Indonesia's maritime sovereignty in the North Natuna Sea. The objective of this study is to analyze the framing employed by national and international media regarding the Indonesia - China diplomatic agreement on the South China Sea, particularly the issue of the North Natuna Sea. Methods: This study employed a qualitative content analysis approach by integrating Entman's Framing Theory, Galtung's Peace Journalism, and Coombs' Crisis Communication Model. Data were collected from four national media outlets Kompas, The Jakarta Post, Detik.com, and Tempo and four international media outlets BBC News, Reuters, South China Morning Post, and The Straits Times published between November 2024 and January 2025. Results: The findings reveal significant disparities in media framing. National media predominantly adopted narratives emphasizing diplomacy and economic cooperation, which are aligned with the principles of peace journalism, whereas international media employed conflict-oriented and geopolitical tension frames consistent with the war journalism approach. The Indonesian government implemented crisis communication strategies, particularly the justification strategy, to manage public perception and reaffirm national sovereignty. Conclusion: This study contributes to the fields of media studies, political communication, and international relations by demonstrating how media framing shapes public opinion and influences foreign policy narratives in the context of maritime geopolitical disputes.

Keywords: *Indonesia-China Relations; Media Framing; Peace Journalism*

ABSTRAK

Pendahuluan: Kesepakatan diplomatik Indonesia-Tiongkok pasca kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing pada November 2024 memicu perdebatan publik tentang kedaulatan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara. Tujuan penelitian adalah menganalisis pembingkai yang dilakukan media nasional dan internasional tentang kesepakatan diplomatik Indonesia-Tiongkok mengenai Laut Cina Selatan, khususnya isu wilayah Laut Natuna Utara. Metode penelitian menggunakan pendekatan analisis konten kualitatif digunakan dengan menggabungkan Teori Framing Entman, Jurnalisme Perdamaian Galtung, dan Model Komunikasi Krisis Coombs. Data dikumpulkan dari empat media nasional, yaitu Kompas, The Jakarta Post, Detik.com, dan Tempo, serta empat media internasional, yaitu BBC News, Reuters, South China Morning Post, dan The Straits Times, pada periode November 2024 hingga Januari 2025. Hasil penelitian mendapatkan temuan yang mengungkapkan disparitas framing yang signifikan, media nasional sebagian besar mengadopsi konsep diplomasi dan kerjasama ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip jurnalisme perdamaian, sedangkan media internasional menerapkan kerangka konflik dan ketegangan geopolitik yang sesuai dengan pendekatan jurnalisme perang. Pemerintah Indonesia menerapkan strategi komunikasi krisis, khususnya strategi pembenaran, untuk mengelola persepsi publik dan menegaskan kembali kedaulatan nasional. Kesimpulan penelitian ini berkontribusi pada studi media, komunikasi politik, dan keilmuan hubungan internasional dengan menunjukkan bagaimana framing media membentuk opini publik dan memengaruhi narasi kebijakan luar negeri dalam konteks perselisihan geopolitik maritim.

Kata kunci: Framing Media; Hubungan Indonesia-China; Jurnalisme Damai

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian: Laut China Selatan merupakan kawasan paling strategis dan dipersengketakan di dunia, sebagai jalur perdagangan utama Asia-Eropa-Amerika yang juga menyimpan cadangan minyak dan gas melimpah (Goh, 2019). Sengketa teritorial di kawasan ini melibatkan China, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam dengan klaim yang saling tumpang tindih. China mengklaim hampir seluruh wilayah melalui konsep Nine-Dash Line yang ditolak negara-negara ASEAN dan bertentangan dengan UNCLOS 1982 (Beckman, 2013). Tribunal Permanen di Den Haag pada 2016 memutuskan klaim tersebut tidak berdasar secara hukum internasional.

Meskipun bukan pihak langsung dalam sengketa, Indonesia memiliki kepentingan vital menjaga kedaulatan perairan Natuna Utara yang masuk Zona Ekonomi Eksklusifnya, mengingat klaim berulang China atas wilayah tersebut kerap memicu ketegangan diplomatik (Wang et al., 2021). Pada November 2024 Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke China dan menandatangani kesepakatan kerja sama maritim dan ekonomi sebagai upaya meredakan ketegangan. Kesepakatan ini memicu respons beragam: sebagian memandangnya sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi, sebagian lain mengkhawatirkan dampaknya terhadap kedaulatan nasional (Zhang & Bateman, 2017). Pernyataan bersama tersebut bahkan dikritisi Maulaya (2025), yang menemukan lima bingkai politik di dalamnya, termasuk indikasi bahwa Indonesia selaras dengan agenda geopolitik China.

Tinjauan literatur: Pada konteks inilah media massa memegang peran sentral. Framing media menentukan bagaimana masyarakat memaknai peristiwa diplomatik tersebut, sebagai peluang kerja sama ataukah ancaman geopolitik (Entman, 1993). Teori framing yang dikembangkan oleh Entman (1993) menjelaskan bahwa media secara aktif mengonstruksi realitas melalui seleksi, penekanan, dan kontekstualisasi informasi, mencakup empat elemen: pendefinisian masalah, identifikasi penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi solusi. Pilihan framing dipengaruhi orientasi editorial dan posisi geopolitik media (McCombs & Shaw, 1972), sebagaimana dibuktikan

Dwijastuti dan Manalu (2022) bahwa orientasi nasional media konsisten mewarnai framing pemberitaan konflik Laut China Selatan.

Martha et al. (2022) menunjukkan media nasional Indonesia (Kompas, The Jakarta Post, Tempo) konsisten membangun pemberitaan sebagai instrumen legitimasi kebijakan luar negeri dalam rivalitas AS-China, sementara Ofori et al. (2025) mengonfirmasi aliansi politik media sebagai prediktor kuat framing konflik internasional secara sistemik.

Dimensi berikutnya menyangkut jenis jurnalisme yang mendasari pilihan framing. Galtung (2002) membedakan jurnalisme damai (solusi diplomatik, bahasa tidak provokatif) dengan jurnalisme konflik (polarisatif, mendramatisasi ketegangan) (Lynch, 2025). Dikotomi ini relevan menganalisis pola pemberitaan kesepakatan Indonesia-China, sebagaimana studi Susilo dan Dizon (2023) terhadap Channel News Asia menunjukkan media regional pun membingkai sengketa dalam rivalitas geopolitik yang lebih luas.

Respons pemerintah terhadap dinamika pemberitaan juga merupakan dimensi penting. Model komunikasi krisis Coombs (2007) mengidentifikasi tiga klaster strategi: deny, diminish (justifikasi rasional untuk meminimalkan tanggung jawab), dan rebuild. Pada konteks diplomatik seperti ini, strategi justifikasi dalam klaster diminish lazim digunakan untuk meyakinkan publik bahwa kebijakan memiliki dasar rasional dan manfaat jangka panjang.

Penelitian ini juga merujuk dua perspektif hubungan internasional: realisme kontemporer, yang memandang negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional (Giusti, 2022) dan neoliberalisme (Koremenos, 2022) yang menekankan kerja sama internasional dapat mengurangi ketegangan. Kedua perspektif ini termanifestasi dalam pola pemberitaan: media nasional cenderung mengadopsi logika neoliberal, media internasional lebih banyak menggunakan bingkai realis.

Analisis kesenjangan: Meski penelitian terdahulu telah ada, terdapat celah yang belum terjawab. Dwijastuti dan Manalu (2022) hanya membandingkan media sesama negara pengklaim tanpa perspektif media global. Martha et al. (2022) terbatas pada

media nasional Indonesia. Maulaya (2025) menganalisis dokumen diplomatik, bukan pemberitaan media massa. Susilo dan Dizon (2023) hanya berfokus pada satu media tanpa perbandingan lintas-media yang sistematis. Ofori et al. (2025) mengkaji framing dalam konflik bersenjata, bukan peristiwa diplomatik yang mengandung narasi kerja sama dan ancaman kedaulatan secara bersamaan.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis framing media nasional dan internasional mengenai kesepakatan diplomatik Indonesia-China di Laut China Selatan. Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah dalam merancang strategi komunikasi kebijakan luar negeri yang lebih efektif; bagi jurnalis dalam membangun kesadaran terhadap orientasi framing; serta bagi akademisi sebagai kontribusi empiris pada kajian komunikasi politik, jurnalisme, dan hubungan internasional di Asia Tenggara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi untuk menganalisis cara media nasional dan internasional membingkai kesepakatan Indonesia-China dalam konteks Laut China Selatan. Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menjelaskan pola framing dalam pemberitaan media sekaligus menginterpretasikan bagaimana strategi komunikasi krisis diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Analisis isi kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa makna, ideologi, dan konstruksi wacana yang tersembunyi di balik teks berita, hal yang tidak dapat diungkap secara memadai oleh analisis kuantitatif semata (Krippendorff, 2004).

Data primer berupa teks berita yang dipublikasikan oleh media nasional dan internasional dalam rentang waktu satu bulan setelah kesepakatan Indonesia-China diumumkan, yaitu dari November 2024-Januari 2025. Pemilihan periode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa fase awal pemberitaan merupakan periode krusial dalam pembentukan opini publik (McCombs & Shaw, 1972). Data dikumpulkan melalui

metode dokumentasi dengan menelusuri arsip berita daring dari sumber-sumber yang memiliki reputasi tinggi dalam peliput isu geopolitik dan hubungan internasional.

Media nasional yang dianalisis meliputi Kompas, The Jakarta Post, Detik.com, dan Tempo, sementara media internasional yang dikaji meliputi BBC News, Reuters, South China Morning Post, dan The Straits Times. Pemilihan kedelapan media tersebut didasarkan pada tiga pertimbangan: (1) reputasi dan kredibilitas editorial dalam meliput isu-isu geopolitik Asia Tenggara, (2) jangkauan audiens yang luas dan representatif, serta (3) kecenderungan editorial yang mencerminkan perspektif nasional maupun global sebagaimana dijelaskan Lee & Chan (2009). Berita yang diseleksi harus secara eksplisit membahas kesepakatan Indonesia-China, kunjungan Presiden Prabowo ke China pada November 2024, atau isu Laut China Selatan dalam kaitannya dengan posisi Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri arsip berita daring secara sistematis menggunakan kata kunci yang relevan, antara lain "kesepakatan Indonesia-China", "Laut China Selatan", "Natuna", "Prabowo Xi Jinping", dan padanan kata dalam bahasa Inggris. Secara keseluruhan, data penelitian ini terdiri dari 47 artikel berita: 3 artikel dari Kompas, 3 artikel dari The Jakarta Post, 3 artikel dari Detik. Com, 3 artikel dari Tempo (total 12 artikel media nasional), serta 8 artikel media internasional (BBC News 2 artikel, Reuters 2 artikel, South China Morning Post 2 artikel, dan The Straits Times 2 artikel). Data diakses melalui arsip resmi masing-masing media dengan menggunakan fitur pencarian internal dan Google Advanced Search dalam rentang November 2024-Januari 2025. Setiap berita yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara manual untuk pengelolaan dan pengkodean data secara sistematis. Upaya ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola bahasa, terminologi yang sering muncul, serta klasifikasi berita berdasarkan kategori framing yang telah ditetapkan dalam teori Entman (1993).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, pengkodean (*coding*) dilakukan dengan mengklasifikasikan setiap berita berdasarkan empat elemen framing Entman (1993): pendefinisian masalah, identifikasi penyebab, evaluasi moral, dan

rekomendasi solusi. Kedua, setiap berita diklasifikasikan berdasarkan tipologi jurnalisme damai atau jurnalisme konflik menurut Galtung (2002), dengan memperhatikan diksi, narasumber yang dikutip, serta perspektif yang ditonjolkan. Ketiga, pernyataan resmi pemerintah yang dikutip dalam pemberitaan media nasional dianalisis untuk mengidentifikasi strategi komunikasi krisis yang dominan berdasarkan model Coombs (2007).

Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan *peer debriefing*. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan pemberitaan dari berbagai media untuk memverifikasi konsistensi pola framing yang ditemukan. Kedua, validasi melalui *peer debriefing* dilakukan dengan mendiskusikan temuan penelitian bersama dosen yang memahami konteks penelitian ini guna meminimalkan bias subjektif dalam interpretasi data. Upaya *peer debriefing* dilakukan sesuai dengan yang dijelaskan oleh Krippendorff (2004). Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, dari Januari hingga Maret 2026, yang mencakup tahap pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pola Framing Media Nasional

Analisis pemberitaan media nasional (Kompas, The Jakarta Post, Detik.com, Tempo) menunjukkan dominasi framing diplomasi dan kerja sama ekonomi. Pada elemen pendefinisian masalah, media nasional konsisten mendefinisikan isu Laut China Selatan bukan sebagai konflik teritorial yang mengancam kedaulatan, melainkan tantangan yang dapat diatasi melalui diplomasi bilateral.

Kompas (10 November 2024) membingkai kunjungan Presiden Prabowo sebagai "kemitraan komprehensif" yang menonjolkan investasi Rp 157 triliun sebagai keberhasilan diplomatik, sementara The Jakarta Post (12 November 2024) membingkainya sebagai penguatan posisi Indonesia melalui kerja sama maritim yang tetap berpijak pada hukum internasional. Pada identifikasi penyebab, media nasional

menyoroti faktor struktural pendorong kerja sama: Tempo (10 November 2024) menonjolkan tujuh bidang kerja sama konkret sebagai bukti orientasi ekonomi, sementara Detik.com (14 November 2024) menonjolkan pernyataan Prabowo bahwa kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi, tanpa menyentuh implikasi hukumnya secara mendalam.

Pada evaluasi moral dan rekomendasi solusi, media nasional menempatkan diplomasi sebagai respons tepat dan positif. Kompas (15 November 2024) menampilkan klarifikasi Kemenlu bahwa kesepakatan "tidak dapat diartikan sebagai pengakuan" klaim China sebagai resolusi memadai. Diksi yang dominan, "kemitraan strategis", "stabilitas kawasan", "blue economy", mengaburkan istilah sensitif seperti "nine-dash line", sementara narasumber didominasi pejabat pemerintah dan akademisi pendukung kerja sama.

Tempo (22 November 2024) Tempo menjadi satu-satunya media yang menampilkan suara kritis lebih proporsional melalui kutipan Grace G. Binowo (IOJI), namun tetap membingkainya sebagai kehati-hatian teknis-hukum, bukan ancaman kedaulatan sistemik, menempatkan isu sebagai perlu klarifikasi lanjutan, bukan pelanggaran mendasar (Tempo.co, 2024a).

Pola Framing Media Internasional

Berbeda secara signifikan dengan media nasional, media internasional, BBC News, Reuters, South China Morning Post, dan The Straits Times, secara dominan menggunakan framing konflik dan ketegangan geopolitik. Pada elemen pendefinisian masalah (define problems), media internasional mendefinisikan kesepakatan Indonesia-China sebagai peristiwa yang berimplikasi serius terhadap keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Reuters (11 November 2024) dalam laporan berjudul "Indonesia says it has no overlapping South China Sea claims with China, despite deal" langsung membingkai isu tersebut sebagai ketegangan antara substansi kesepakatan dan posisi resmi Indonesia. Berita tersebut menempatkan pemaksaan Indonesia untuk mengklarifikasi posisinya sebagai petunjuk bahwa perjanjian itu berisiko mengompromikan hak-hak berdaulat Indonesia, sementara analisis memperingatkan

bahwa perjanjian yang ditandatangani telah menimbulkan sensitivitas strategis bagi kawasan. BBC News mengambil sudut pandang serupa dengan menekankan kontradiksi antara pernyataan bersama dan tradisi panjang kebijakan luar negeri Indonesia sebagai negara non-pengklaim di Laut China Selatan (Reuters, 2024).

Pada elemen identifikasi penyebab (*diagnose causes*), media internasional secara konsisten menempatkan ekspansi strategis China sebagai aktor penggerak utama. South China Morning Post (26 Januari 2025), dalam laporan "In the South China Sea, Indonesia tests the limits of non-alignment", mengonstruksi penyebab ketegangan dalam kerangka persaingan pengaruh geopolitik yang lebih besar: laporan tersebut menyoroti bagaimana kunjungan kenegaraan Prabowo ke Beijing diikuti oleh pernyataan bersama yang menyebutkan kedua negara telah mencapai "kesepahaman penting untuk melakukan pengembangan bersama di wilayah dengan klaim yang saling tumpang tindih", dan mengutip para pengamat yang memperingatkan bahwa perjanjian semacam itu dapat "mengaburkan air", baik secara harfiah maupun kiasan. The Straits Times menempatkan kesepakatan tersebut secara eksplisit dalam konteks pertanyaan tentang konsistensi Indonesia mempertahankan posisi non-bloknya di tengah tekanan geopolitik dari China dan AS, dengan mengutip analisis keamanan maritim Collin Koh dari S. Rajaratnam School of International Studies yang menyatakan bahwa frasa "overlapping claims" dalam pernyataan bersama itu sesungguhnya telah mengubah posisi strategis Indonesia secara fundamental (South China Morning Post, 2025).

Pada aspek evaluasi moral (*make moral judgment*) dan rekomendasi solusi (*suggest remedies*), media internasional menyajikan penilaian yang jauh lebih kritis. The Diplomat (12 November 2024) dalam artikel "Did Indonesia Just Capitulate to China on the South China Sea?" menggunakan diksi yang secara langsung mempertanyakan integritas kebijakan Indonesia: pernyataan bersama tersebut dinilai sebagai tanda bahwa Indonesia "telah dipaksa mengklarifikasi" posisinya, sebuah formulasi yang menempatkan Indonesia bukan sebagai aktor yang berdaulat penuh, melainkan sebagai pihak yang terjebak oleh konsekuensi perjanjian yang tidak sepenuhnya dipahaminya. Pilihan diksi yang mendominasi pemberitaan media

internasional sangat kontras dengan media nasional: "capitulate" (menyerah), "nine-dash line trap" (jebakan garis putus-putus), "undermine sovereignty" (melemahkan kedaulatan), "forced to clarify" (dipaksa mengklarifikasi), "implicit acknowledgment" (pengakuan implisit), dan "inconsistency" (inkonsistensi). Narasumber yang dikutip jauh lebih beragam dan independen, mencakup analis keamanan maritim internasional, pakar hukum laut dari berbagai negara, serta pejabat dari negara-negara ASEAN pengklaim yang secara terbuka mengkhawatirkan preseden yang dapat ditimbulkan oleh kesepakatan tersebut bagi posisi kolektif ASEAN dalam menghadapi klaim China (The Diplomat, 2024).

Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia

Berbeda dengan media nasional, media internasional seperti BBC News, Reuters, South China Morning Post, dan The Straits Times secara dominan membingkai kesepakatan Indonesia-China melalui perspektif konflik dan ketegangan geopolitik. Pada elemen pendefinisian masalah (*define problems*), media internasional melihat kesepakatan tersebut sebagai isu yang berpotensi memengaruhi keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Reuters (11 November 2024a) melalui laporan "*Indonesia says it has no overlapping South China Sea claims with China, despite deal*" membingkai persoalan sebagai kontradiksi antara substansi perjanjian dan posisi resmi Indonesia. Pemberitaan tersebut menyoroti bahwa kebutuhan Indonesia untuk melakukan klarifikasi menunjukkan adanya risiko terhadap persepsi kedaulatan dan kepentingan strategis Indonesia di Laut China Selatan.

Pada aspek identifikasi penyebab (*diagnose causes*), media internasional secara konsisten menempatkan peningkatan pengaruh strategis China sebagai faktor utama munculnya kekhawatiran kawasan. South China Morning Post (2025) dalam laporan "*In the South China Sea, Indonesia tests the limits of non-alignment*" menempatkan kesepakatan tersebut dalam konteks persaingan geopolitik yang lebih luas. Media ini menyoroti bahwa penggunaan istilah "overlapping claims" dalam pernyataan bersama Indonesia-China dianggap dapat mengubah persepsi terhadap posisi tradisional Indonesia sebagai negara non-pengklaim.

Pada elemen evaluasi moral (*make moral judgment*) dan rekomendasi solusi (*suggest remedies*), media internasional menunjukkan pendekatan yang lebih kritis. The Diplomat (2024) bahkan mempertanyakan apakah Indonesia telah melakukan kompromi terhadap kebijakan Laut China Selatan melalui penggunaan istilah seperti “*capitulate*”, “*undermine sovereignty*”, dan “*forced to clarify*”. Narasi tersebut menggambarkan Indonesia sebagai aktor yang menghadapi tekanan strategis akibat meningkatnya pengaruh China. Selain itu, media internasional banyak mengutip analisis keamanan maritim dan pakar hukum laut yang memperingatkan bahwa kesepakatan tersebut dapat menciptakan preseden bagi dinamika ASEAN dalam menghadapi klaim China.

Tabel 1. Perbandingan Framing Media Nasional dan Internasional terhadap Kesepakatan Indonesia-China

Kategori	Media Nasional (Kompas, The Jakarta Post, Detik.com, Tempo)	Media Internasional (BBC News, Reuters, SCMP, The Straits Times)
Fokus Pemberitaan	Kerja sama ekonomi dan stabilitas diplomasi bilateral	Pengaruh geopolitik China dan potensi ketegangan regional
Framing Dominan	Framing diplomasi dan ekonomi	Framing konflik dan geopolitik
Define Problems	Tantangan yang dapat diselesaikan melalui diplomasi	Ancaman terhadap kedaulatan dan keseimbangan kekuatan
Diagnose Causes	Kebutuhan investasi dan kepentingan ekonomi bersama	Ekspansi strategis China dan persaingan geopolitik
Make Moral Judgment	Kerja sama sebagai langkah positif dan menguntungkan	Perlu kewaspadaan terhadap ketergantungan pada China
Suggest Remedies	Penguatan kerja sama diplomatik dan ekonomi	Diversifikasi mitra dan penguatan posisi hukum internasional
Diksi Dominan	"Kemitraan strategis", "kerja sama ekonomi", "stabilitas kawasan"	"Ekspansi China", "ancaman kedaulatan", "ketergantungan ekonomi"
Pendekatan Jurnalisme	Jurnalisme damai (peace journalism)	Jurnalisme konflik (war journalism)
Sumber Dikutip	Pejabat pemerintah, akademisi pro-kerja sama	Analisis geopolitik independen, akademisi internasional
Strategi Komunikasi Krisis	Justifikasi: kerja sama tidak mengancam kedaulatan	Kritik terhadap peningkatan pengaruh China

Sumber: Hasil analisis penulis (2025)

Pembahasan

Temuan penelitian ini mengonfirmasi dan memperkaya teori framing Entman (1993), perbedaan signifikan dalam cara media nasional dan internasional mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebab, membuat evaluasi moral, dan merekomendasikan solusi menunjukkan bahwa proses framing mencerminkan orientasi ideologi, kepentingan nasional, dan posisi geopolitik media, sejalan dengan argumen Entman bahwa framing merupakan manifestasi kekuasaan dalam komunikasi.

Temuan ini terkait dengan Dwijastuti dan Manalu (2022), yang mengkaji framing konflik Laut China Selatan pada empat media Asia Tenggara dan menemukan perbedaan framing sesuai konteks nasional masing-masing. Penelitian ini mengonfirmasi sekaligus memperluas temuan tersebut: kesenjangan framing terbukti jauh lebih tajam ketika perbandingan dilakukan antara media negara yang terlibat langsung secara diplomatik (Indonesia) dengan media dari negara berkepentingan geopolitik berbeda di luar kawasan.

Temuan ini juga memperkuat dan memperluas penelitian Martha et al. (2022), yang menemukan media nasional Indonesia, Kompas, The Jakarta Post, Tempo, konsisten mendukung kebijakan luar negeri dengan posisi netral dalam rivalitas AS-China. Penelitian ini mengonfirmasi orientasi serupa dalam konteks berbeda, yakni kesepakatan bilateral Indonesia-China, menunjukkan bahwa pola framing pro-pemerintah bersifat lintas-konteks dan tidak bergantung pada konfigurasi aktor yang spesifik.

Selaras dengan penelitian Sugiarti (2020), yang menemukan media China membingkai sengketa dalam kerangka kepentingan nasional dan legitimasi historis, media nasional Indonesia dalam penelitian ini menunjukkan pola analog: membingkai kesepakatan dalam kerangka kepentingan nasional dan manfaat ekonomi bilateral, mengindikasikan bahwa orientasi kepentingan nasional kuat memengaruhi framing terlepas dari identitas nasional media.

Relevansi kerangka framing Entman (1993) juga dikonfirmasi oleh penelitian pada isu domestik Indonesia Fadli (2021) pada pemberitaan kepulauan WNI saat

pandemi, dan Riski (2022) pada framing vaksinasi Covid-19 di Detik.com, yang keduanya menemukan konstruksi framing dipengaruhi kedekatan media dengan narasi resmi pemerintah. Kedua penelitian ini memperkuat validitas metodologis pendekatan yang digunakan, sekaligus menunjukkan bahwa pola framing pro-pemerintah berlanjut konsisten dari isu domestik ke isu geopolitik internasional.

Di tataran yang lebih luas, penelitian Ofori et al. (2025) yang mengkaji framing perang Rusia-Ukraina menemukan aliansi politik negara asal media memengaruhi konstruksi narasi secara sistemik. Penelitian ini memperkuat tesis tersebut dengan membuktikan logika serupa berlaku pula dalam peristiwa diplomatik kooperatif namun kontroversial, dimensi yang belum diuji dalam penelitian mereka.

Berdasarkan perspektif jurnalisme damai dan konflik (Galtung, 2002), temuan penelitian ini memperlihatkan dualitas yang cukup jelas: media nasional Indonesia mengadopsi prinsip jurnalisme damai, menonjolkan solusi diplomatik, menghindari bahasa provokatif, memberi ruang bagi narasumber pendukung kerja sama, sementara media internasional menerapkan jurnalisme konflik, menyoroti ketegangan dan mempresentasikan aktor secara dikotomis.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dwijastuti dan Manalu (2022) yang menemukan The Jakarta Post lebih berimbang dibanding media pengklaim lain. Penelitian ini memperluas temuan tersebut: keberimbangan itu merupakan bagian dari pola jurnalisme damai yang konsisten di keempat media nasional Indonesia, dan dengan menyertakan media internasional sebagai pembanding, kontras antara orientasi damai versus konflik tampak lebih tajam, dimensi yang tidak terjangkau Dwijastuti dan Manalu karena seluruh media mereka berasal dari sesama negara Asia Tenggara.

Merujuk kritik Lynch (2025), bahwa jurnalisme damai tanpa sikap kritis dapat menjadikan media corong pemerintah, temuan Martha et al. (2022) mengonfirmasi kekhawatiran ini: orientasi damai media nasional lebih merupakan konsekuensi kedekatan struktural media-pemerintah daripada pilihan normatif independen. Pola serupa terulang dalam penelitian ini: dominannya narasumber pemerintah dan absennya suara kritis menimbulkan pertanyaan tentang independensi editorial. Di sisi lain,

jurnalisme konflik media internasional juga tidak bebas dari bias, sebagaimana ditunjukkan Susilo dan Dizon (2023), bahwa Channel News Asia membingkai isu ini sebagai cerminan persaingan dagang AS-China yang lebih luas. Dengan demikian, kedua orientasi jurnalisme tersebut sama-sama mengandung bias kepentingan, meski berbeda arah.

Temuan Riski (2022) pada framing vaksinasi Covid-19 memperkuat hal ini: media nasional cenderung menjadi perpanjangan pesan pemerintah lintas isu, mengindikasikan pola sistemik dalam relasi media-negara di Indonesia, sekaligus mempertegas peringatan Lynch (2025) bahwa jurnalisme damai tanpa independensi editorial berpotensi melemahkan fungsi watchdog media.

Penerapan strategi justifikasi (Coombs 2007) oleh pemerintah Indonesia memperlihatkan kesadaran akan kekuatan pembentuk opini media. Dengan menegaskan kesepakatan hanya mencakup ekonomi tanpa kaitan klaim teritorial, strategi ini memisahkan isu kerja sama dari isu kedaulatan, dan efektif pada media nasional yang konsisten mengadopsi narasi pemerintah, sejalan dengan Martha et al. (2022).

Namun, Maulaya (2025) memberikan dimensi kritis: analisis pernyataan bersama Indonesia-China 2024 mengungkap bingkai yang justru melemahkan posisi tawar Indonesia, termasuk indikasi keselarasan dengan agenda China, sebuah paradoks di mana komunikasi krisis berhasil meredam kekhawatiran domestik, namun substansi kesepakatan menghadirkan risiko geopolitik lebih fundamental.

Keterbatasan strategi ini semakin jelas pada media internasional, yang tidak serta-merta mengadopsi narasi pemerintah, mencerminkan temuan Dwijastuti dan Manalu (2022) bahwa framing media internasional digerakkan oleh kepentingan nasional negara asal. Ofori et al. (2025) memperkuat hal ini: pembentukan narasi media internasional memiliki keterbatasan inheren karena framing digerakkan oleh kepentingan politik negara asal media. Implikasinya, pemerintah perlu mengembangkan kapasitas diplomasi publik yang lebih proaktif, melampaui pernyataan resmi bilateral.

Secara integratif, ketiga kerangka teoritis penelitian ini, Entman (1993), Galtung (2002), dan Coombs (2007) saling melengkapi dalam satu ekosistem naratif: framing

menentukan konstruksi realitas, jenis jurnalisme menjelaskan orientasi normatif di baliknya, sementara strategi krisis menggambarkan respons aktor terhadapnya. Media nasional memilih framing kerja sama yang dilandasi jurnalisme damai sehingga menciptakan ruang reseptif bagi justifikasi pemerintah, sebaliknya media internasional menggunakan framing konflik dengan jurnalisme konflik sehingga justifikasi pemerintah menghadapi resistensi internasional. Sintesis tiga-lapis ini merupakan kontribusi orisinal penelitian ini, mengoperasionalisasikan ketiga teori secara simultan dalam konteks diplomatik non-konflik bersenjata di Asia Tenggara, dimensi yang belum pernah diuji secara sistematis sebelumnya.

Temuan ini sejalan dengan Nurhayati et al. (2021) mengenai kasus glorifikasi Saipul Jamil, yang menunjukkan pilihan framing media online tidak lepas dari kepentingan komersial dan rating, sebagaimana perbedaan framing dalam penelitian ini juga mencerminkan kepentingan masing-masing media, meski dalam konteks isu berbeda.

Temuan ini menegaskan bahwa framing media dalam pemberitaan internasional tidak terlepas dari kepentingan politik dan ekonomi masing-masing media, dikonfirmasi secara berlapis oleh Dwijastuti dan Manalu (2022), Martha et al. (2022), Maulaya (2025), Susilo dan Dizon (2023), serta Ofori et al. (2025), menunjukkan bahwa framing sebagai cerminan kepentingan nasional bersifat universal dalam jurnalisme geopolitik. Implikasinya, pemerintah perlu koherensi antara substansi kebijakan dan komunikasi publik, sementara jurnalis perlu *reflexivity* terhadap orientasi framing yang digunakan.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji perbedaan framing media nasional dan internasional dalam memberitakan kesepakatan diplomatik Indonesia-China di Laut China Selatan serta mengevaluasi strategi komunikasi krisis pemerintah Indonesia. Tiga temuan utama: media nasional dominan menggunakan framing diplomasi-kerja sama (jurnalisme damai), sementara media internasional menggunakan framing konflik-geopolitik (jurnalisme konflik), sesuai teori Entman bahwa framing

mencerminkan kepentingan dan posisi geopolitik media; pemerintah menerapkan strategi justifikasi yang efektif domestik namun terbatas pengaruhnya pada media internasional; dan pola framing berbasis kepentingan nasional terbukti konsisten lintas konteks dan waktu. Kontribusi orisinal penelitian ini: (1) mengoperasionalkan Framing Theory (Entman), Peace/War Journalism (Galtung), dan Crisis Communication Model (Coombs) sebagai kerangka terpadu; (2) membuktikan pola framing kepentingan nasional berlaku juga dalam peristiwa diplomatik non-konflik bersenjata; (3) menjadi kajian sistematis pertama yang membandingkan framing media nasional-internasional pada kesepakatan Indonesia-China pasca-2024. Keterbatasan penelitian ini berfokus pada teks berita daring tanpa media sosial dan tanpa pengukuran dampak persepsi publik, sehingga penelitian lanjutan disarankan memperluas ke media sosial dan analisis resepsi audiens, sementara pemerintah disarankan memperkuat diplomasi publik dan transparansi komunikasi kebijakan luar negeri.

REFERENSI

- BBC News. (2024). *Indonesia's maritime deal with China raises sovereignty concerns*.
<https://www.bbc.com/news/asia>
- Beckman, R. (2013). The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea. *American Journal of International Law*, 107(1), 142–163. <https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.107.1.0142>
- Coombs, W. T. (2007). *Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding* (2nd ed.). Sage Publication.
- Detik.com. (2024). *Penegasan Prabowo soal sikap RI di Laut China Selatan*.
<https://news.detik.com/berita/d-7639037/penegasan-prabowo-soal-sikap-ri-di-laut-china-selatan>
- Dwijastuti, P., & Manalu, S. R. (2022). Transnational comparative framing analysis of South China Sea conflict in Southeast Asian online media coverage. *Interaksi Online*, 10(3), 252–265.
- Eni Nurhayati, Sukarno, & Ikwan Setiawan. (2021). Analisis Framing Pemberitaan

Framing Media Nasional dan Internasional tentang Kesepakatan Diplomatik Indonesia China di Laut
China Selatan
(Joko Prawito; Sudarto; Aprilianti Pratiwi; Bonny Perkasa Halim)

- Media Online Mengenai Kasus Glorifikasi Saipul Jamil . *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 289–306.
<https://doi.org/10.21009/COMMUNICOLOGY.022.010>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
<https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Fadli, M. R. (2021). Konstruksi berita “Kepulauan WNI dari Malaysia akibat pandemi Covid-19” pada media online Tribun Batam.Id dan Haluan Kepri.Id. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 68–84.
<https://doi.org/10.21009/COMMUNICOLOGY.021.05>
- Galtung, J. (2002). Peace journalism: A challenge. In *W. Kempf & H. Luostarinen (Eds.), Journalism and the new world order* (hal. 259–272). Nordicom.
- Giusti, S. (2022). *The Fall and Rise of National Interest: A Contemporary Approach*. Springer.
- Goh, E. (2019). *Power, order and change in world politics*. Cambridge University Press.
- Koremenos, B., et al. (2022). The rational design of international institutions. *International Organization*, 55(4). 761-799.
- Kompas.com. (2024a). *Kemenlu tegaskan kerja sama maritim Indonesia-China bukan berarti mengakui “Nine Dash Lines.”*
<https://nasional.kompas.com/read/2024/11/11/11071461/kemenlu-tegaskan-kerja-sama-maritim-indonesia-china-bukan-berarti-mengakui>
- Kompas.com. (2024b). *Langkah Prabowo di Laut Natuna*.
<https://www.kompas.com/global/read/2024/11/15/072023570/langkah-prabowo-di-laut-natuna>
- Kompas.com. (2024c). *Sorotan media asing saat Presiden Prabowo temui Xi Jinping di China*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/10/133000065/sorotan-media-asing-saat-presiden-prabowo-temui-xi-jinping-di-china>
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology* (2nd

- ed.). Sage Publication.
- Lee, P. S. N., & Chan, J. M. (2009). Framing and priming in international news coverage of China's territorial disputes. *Asian Journal of Communication, 19*(2), 135–152. <https://doi.org/10.1080/01292980902827132>
- Lynch, J., (2025). Peace journalism in the new millennium: New challenges with the changing face of conflict. Dalam S. Roy (Ed.), *The handbook of conflict and peace communication* (hlm. 181-195). John Wiley & Sons, Inc.
- Martha, J., Harsawaskita, A., Syawfi, I., & Margono, V. T. (2022). Analisis framing: Pemberitaan media massa mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam menanggapi rivalitas Amerika Serikat dan China (2019-2022). *Jurnal Dinamika Global, 7*(2). <https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1070>
- Maulaya, M. (2025). The political framing of the 2024 China-Indonesia joint statement. *Jurnal Global, 27*(1).
- McCombs, M., & Shaw, D. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly, 36*(2), 176–187. <https://doi.org/10.1086/267990>
- Ofori, M., Ha, L., & Sharma, S. (2025). Political allies in foreign war news framing: A four-country comparison of the 2022 Russia–Ukraine war news coverage. *Journalism Practice*. <https://doi.org/10.1177/17480485251404806>
- Reuters. (2024). *Indonesia says it has no overlapping South China Sea claims with China, despite deal*. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-says-it-has-no-overlapping-south-china-sea-claims-china-despite-deal>
- Riski, P. (2022). Citra media dan Kementerian Kesehatan dalam vaksinasi Covid-19 di Makassar. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi, 10*(2), 151–166. <https://doi.org/10.21009/COMMUNICOLOGY.030.010>
- South China Morning Post. (2024). *Indonesia's Prabowo on managing South China Sea row: "Partnerships better than conflicts."* <https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3286486/indonesias-prabowo-managing-south-china-sea-row-partnerships-better-conflicts>

- South China Morning Post. (2025). *In the South China Sea, Indonesia tests the limits of non-alignment*.
<https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3296199/south-china-sea-indonesia-tests-limits-non-alignment>
- Sugiarti, P. I. (2020). Pengaruh konstruksi berita media online Xinhua terhadap eskalasi konflik Laut Cina Selatan tahun 2016–2017. *Jurnal Kajian Media dan Komunikasi*, 5(2), 78–93.
- Susilo, D., & Dizon, C. C. G. (2023). Framing analysis of China's relationship about the South China Sea dispute on Channel News Asia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(10), 964–973. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i10.653>
- Tempo.co. (2024a). *IOJI sebut pernyataan bersama Prabowo-Xi Jinping bisa menguntungkan Cina di Laut Natuna Utara*.
<https://www.tempo.co/internasional/ioji-sebut-pernyataan-bersama-prabowo-xi-jinping-bisa-menguntungkan-cina-di-laut-natuna-utara-1171983>
- Tempo.co. (2024b). *Kunjungan Prabowo ke Cina, hasilkan beberapa kesepakatan*.
<https://www.tempo.co/politik/kunjungan-prabowo-ke-cina-hasilkan-beberapa-kesepakatan--1168150>
- The Diplomat. (2024). *Did Indonesia just capitulate to China on the South China Sea?*
<https://thediplomat.com/2024/11/did-indonesia-just-capitulate-to-china-on-the-south-china-sea/>
- The Jakarta Post. (2024). *Indonesia says it has no overlapping South China Sea claims with China*.
<https://www.thejakartapost.com/world/2024/11/11/indonesia-says-it-has-no-overlapping-south-china-sea-claims-with-china.html>
- The Straits Times. (2024). *Keeping it balanced: Prabowo's US and China tour shows Indonesia's foreign policy ambition*.
<https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/keeping-it-balanced-prabowos-us-and-china-tour-shows-indonesias-foreign-policy-ambition>
- Wang, Z., Li, Q., & Chen, H. (2021). South China Sea disputes and Indonesia's

Framing Media Nasional dan Internasional tentang Kesepakatan Diplomatik Indonesia China di Laut
China Selatan
(Joko Prawito; Sudarto; Aprilianti Pratiwi; Bonny Perkasa Halim)

response to China's maritime claims. *Journal of Southeast Asian Studies*, 52(3), 420–343. <https://doi.org/10.1017/S0022463421000345>

Zhang, H., & Bateman, S. (2017). Fishing militia, the securitization of fishery, and the South China Sea dispute. *Journal of Contemporary Asia*, 47(2), 326–343. <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1284143>